

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahsanul Minan, dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik* (Jakarta: Bawaslu, 2019).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke-9* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011).

Roosiah Yuniarsih, dkk, *Penataan Wewenang Dan Tugas MPR* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020).

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014) .

Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jurnal:

Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaharuan Demokrasi Pancasila”. *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020*.

Agusniwan Etra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana”, *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2002*.

Ahmad Sobari, “Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif”, *Jurnal National journal of Law, Volume 5, Nomor 2, September 2021*.

Deni Nurdyana Hadimin, “Analisis Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun Pemerintahan Daerah Yang Lebih Demokratis”. *Jurnal Unikom, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2015*.

Donal Fariz. Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020*.

Jovano Deivid O, dan Murniyati Yanur, “Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol.9, No, 02 Desember 2022*.

M. Ashraf Ali, dkk, “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2023*.

M. Holy One N. Singadimedja, dan Ida R Hasan, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Bagi Mantan Terpidana Ditinjau Dari Aspek Pembedaan”. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 11, No. 1, Mei 2022, hlm 101-119*.

Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati, “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia”, *Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017*.

Nyoman Mas Aryanti dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 12, Juni 2020*.

